

# TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

M GEOVANI SANAHAN

31.0226

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*  
email: Geovani.sanahan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Herson Simbolon, S.H, M.Si

## ABSTRACT

**Background (GAP):** The flood disaster that strikes the city of Palembang annually presents a significant challenge that the Palembang City Government must address. The effectiveness of the government's performance in managing flood disasters in Palembang depends on the collaborative efforts between various agencies, from pre-disaster preparations to post-disaster recovery. **Objective:** This study aims to evaluate how collaboration between government agencies impacts the effectiveness of flood disaster management in Palembang, focusing on both technical and non-technical measures. **Method:** A descriptive qualitative research method was employed, deemed suitable for addressing the study's objectives. The data collected is descriptive and qualitative, consisting of interviews and field notes, including documents and other materials. **Results/Findings:** The research indicates that successful flood disaster management in Palembang hinges on the collaboration between government agencies and active community participation. Both technical and non-technical efforts must be unified, with cooperation being a critical factor in disaster response. **Conclusion:** The collaborative program for handling flood disasters in Palembang has been implemented effectively, involving all elements of the city government. Recommendations include optimizing coordination for fieldwork deployment and maximizing city government facilities to anticipate disasters better. Additionally, community participation and environmental discipline are essential to prevent flood disasters.

**Keywords:** collaboration, flood management, Palembang city, South Sumatera province.

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP):** Bencana banjir yang melanda kota Palembang setiap tahun merupakan tantangan signifikan yang harus diatasi oleh Pemerintah Kota Palembang. Efektivitas kinerja pemerintah dalam mengelola bencana banjir di Palembang bergantung pada upaya kolaboratif antara berbagai instansi, mulai dari persiapan pra-bencana hingga pemulihan pasca-bencana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kolaborasi antar instansi pemerintah mempengaruhi efektivitas pengelolaan bencana banjir di Palembang, dengan fokus pada langkah-langkah teknis dan non-teknis. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dianggap sesuai untuk menjawab tujuan penelitian ini. Data yang

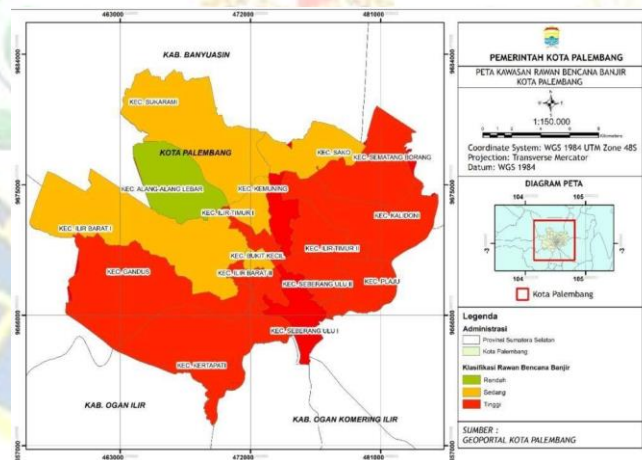
dikumpulkan bersifat deskriptif dan kualitatif, terdiri dari wawancara dan catatan lapangan, termasuk dokumen dan materi lainnya. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan bencana banjir di Palembang sangat bergantung pada kolaborasi antar instansi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya teknis dan non-teknis harus terintegrasi, dengan kerjasama menjadi faktor kritis dalam respons terhadap bencana. **Kesimpulan:** Program kolaboratif untuk penanganan bencana banjir di Palembang telah diimplementasikan secara efektif, melibatkan semua elemen pemerintah kota. Rekomendasi mencakup optimalisasi koordinasi untuk penempatan tenaga lapangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah kota secara maksimal untuk lebih baik mengantisipasi bencana. Selain itu, partisipasi masyarakat dan disiplin lingkungan sangat penting untuk mencegah bencana banjir.

**Kata Kunci:** kolaborasi, pengelolaan banjir, kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Palembang merupakan kota di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, yang sering kali dilanda bencana banjir. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia, dengan luas yang signifikan di dataran rendah dan terdiri dari banyak sungai dan rawa. Dalam beberapa dekade terakhir, Palembang mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas bencana banjir yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, degradasi lingkungan, dan peningkatan urbanisasi tanpa perencanaan tata kota yang memadai. Dibawah ini adalah peta Kawasan rawan banjir di Palembang menurut Geoportal Kota Palembang, 2022 (Angrelia et al., 2020).



Secara geografis, Palembang memiliki topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Keberadaan Sungai Musi yang membelah kota menjadikannya bagian utara (Seberang Ulu) dan selatan (Seberang Ilir) membuatnya sangat rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Sungai Musi juga dipengaruhi oleh pasang surut air, yang mempengaruhi tingkat air di sekitar kota (Baskoro & Hertati, 2022).

Faktor penting yang menyebabkan bencana banjir di Palembang adalah penurunan kemampuan daerah aliran sungai (DAS), pendangkalan sungai, dan kurangnya daerah resapan air yang memperburuk kualitas penyerapan air di wilayah perkotaan. Kawasan-kawasan rawa yang semakin rusak juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini. Hal ini mengakibatkan genangan air yang luas dan menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi penduduk Palembang.

Pada periode lima tahun terakhir, data menunjukkan bahwa curah hujan di kota Palembang cenderung tinggi, terutama dari bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang tinggi ini secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya banjir di wilayah perkotaan, mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat serta infrastruktur kota seperti jalan raya, perkantoran, dan pemukiman. Penyebab lain yang berkontribusi terhadap risiko banjir adalah adanya permukiman kumuh di dataran banjir perkotaan dan padatnya pemukiman penduduk tanpa area resapan yang memadai.

Perencanaan tata ruang kota yang kurang efektif juga menjadi masalah serius. Palembang mengalami pertumbuhan populasi yang cepat dan ekonomi yang berkembang pesat, namun ini tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan tata kota yang memadai. Kurangnya pengaturan ini memperburuk kerentanan kota terhadap bencana banjir.

Pemerintah Kota Palembang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan menerapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengidentifikasi daerah rawan banjir dan mengatur penggunaan lahan. Namun, implementasi peraturan ini sering kali menghadapi tantangan dalam koordinasi antarinstansi terkait serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk menangani bencana banjir secara efektif.

Upaya kolaborasi antar berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat juga terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana banjir. Kolaborasi ini melibatkan berbagai kegiatan pra-bencana seperti perencanaan dan persiapan, serta kegiatan pasca-bencana seperti pemulihan dan rekonstruksi. Sinergi antar berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam mengurangi risiko dan dampak bencana banjir di Palembang.

Dalam konteks hukum dan administratif, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk mengelola sumber daya dan menangani berbagai masalah di wilayahnya sendiri. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan dan koordinasi antarinstansi tetap menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir di kota ini.

Dengan pemahaman mendalam tentang latar belakang ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab serta strategi efektif dalam mengelola bencana banjir di kota Palembang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan dan resiliensi kota terhadap bencana banjir di masa depan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Dalam konteks penelitian tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa kesenjangan yang muncul dari perumusan masalah yang diambil. Pertama, kesenjangan yang muncul adalah terkait dengan

implementasi teori kolaboratif governance dalam konteks spesifik penanggulangan bencana banjir. Meskipun teori ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk kolaborasi lintas sektoral dan lintas lembaga, tantangan nyata dalam mengintegrasikan teori ini ke dalam praktek di lapangan seringkali kompleks dan memerlukan adaptasi yang tepat dengan kondisi lokal yang unik.

Kedua, kesenjangan yang patut diperhatikan adalah sejauh mana keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam menghadapi bencana banjir di Kota Palembang dapat diukur dan dinilai secara obyektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan indikator kinerja yang jelas dan evaluasi yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas dari kolaborasi tersebut. Tanpa metode evaluasi yang kuat, sulit untuk memastikan bahwa kerjasama lintas sektoral benar-benar membawa dampak positif yang signifikan dalam mengurangi risiko bencana banjir.

Ketiga, kesenjangan yang juga relevan adalah terkait dengan ketimpangan dalam partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses kolaborasi ini. Meskipun masyarakat diidentifikasi sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam penanggulangan bencana, belum ada cukup fokus dalam penelitian ini terhadap bagaimana meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program. Ini menjadi penting karena keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan resiliensi komunitas terhadap bencana dan memperkuat keberlanjutan dari upaya-upaya penanggulangan.

Kesenjangan-kesenjangan ini memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mendalam dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut. Diperlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya memperhitungkan aspek teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, politik, dan budaya dalam mengembangkan strategi kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai penanggulangan banjir dengan menggunakan kolam retensi di Sungai Lamasi Kabupaten Luwu, yang dilakukan oleh Ali A., M.Musa R., dan Mallombasi A., mengungkapkan bahwa banjir sering kali menyebabkan kerugian besar di daerah ini. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kota besar dibangun di dataran banjir, termasuk Kabupaten Luwu. Sungai-sungai di bagian utara kabupaten ini sering menyebabkan banjir, sehingga diperlukan metode pengendalian banjir yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa kolam retensi merupakan metode yang optimal dan efisien dalam mengendalikan banjir baik dari segi biaya maupun efektivitasnya. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini menganalisis debit banjir dan volume kolam retensi yang dibutuhkan. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan elevasi tanggul +11.50 m dan tampungan sebesar 4,401,226.04 m<sup>3</sup>, kolam retensi mampu mengendalikan debit banjir yang dihitung sebesar  $Q_{10} = 64.79 \text{ m}^3/\text{dt}$  (Ali et al., 2021).

Studi tentang manajemen risiko dalam mengantisipasi bencana di wilayah kerja Puskesmas Kota Palembang oleh Simamora S., Mangunsong S., dan Dalilah A. menemukan bahwa meskipun Palembang tidak termasuk daerah yang rawan bencana secara historis, namun peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan fisik yang pesat telah mengurangi ruang terbuka hijau, sehingga menyebabkan bencana seperti banjir dan kebakaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa petugas

Puskesmas memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen risiko bencana, namun kebijakan dan sumber pendanaan yang ada belum memadai. Meski begitu, aspek kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori baik. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk memperkuat kesiapsiagaan Puskesmas di Palembang (Simamora et al., 2023).

Penelitian Khafian N. mengenai peran tata kelola kolaboratif dalam manajemen bencana di Indonesia mengungkapkan bahwa koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat penting dalam mitigasi darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur dan data sekunder untuk mengeksplorasi pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat membantu menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi dan kepemimpinan yang lemah sering kali menghambat proses kolaborasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kepemimpinan dalam manajemen bencana (Khafian, 2023).

Yulianti Y. D., Huda M., dan Suhindarno H. dalam penelitian mereka tentang adaptasi tata kelola dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa konsep adaptive governance sangat penting dalam penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan berbagai lembaga mulai dari pemerintah daerah hingga relawan banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan antar lembaga formal dan informal dalam menangani bencana tahunan yang terjadi di Bojonegoro. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi yang lebih baik dan tata kelola yang responsif untuk penanggulangan bencana yang lebih efektif (Yulianti et al., 2023).

Penelitian Afryan S. mengenai implementasi kebijakan peraturan Bupati Bandung No 53 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik wawancara, observasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penerapan peraturan ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta alokasi anggaran yang lebih memadai untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung (Afryan S, 2019).

Penelitian oleh Kurniasari N. dan Priyatna F. N. P. mengenai kebijakan pemerintah dan adaptasi masyarakat dalam penanggulangan dampak banjir terhadap usaha budidaya ikan di tambak mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan untuk mitigasi bencana banjir. Penelitian yang dilakukan di pantai utara Jawa Barat ini menemukan bahwa jaringan sosial menjadi bentuk adaptasi yang efektif bagi pembudidaya ikan dalam menanggulangi dampak banjir. Namun, penelitian ini juga menekankan perlunya intervensi lebih lanjut dalam penanggulangan tanggap darurat dan rehabilitasi sarana produksi (Kurniasari & Priyatna, 2014).

Nuzsa Miyori F. dan Chofyan I. dalam penelitian mereka mengenai strategi penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung, menemukan bahwa faktor dominan penyebab banjir adalah masalah pada bangunan pengendali banjir. Penelitian ini menggunakan metode gabungan dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta analisis regresi linier

berganda dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir, serta monitoring dan evaluasi sistem drainase sangat penting untuk penanggulangan banjir yang efektif di Kelurahan Rancabolang (Nuzsa Miyori & Chofyan, 2023).

Penelitian oleh Yusni Rahmayanti dan Geovani Meiwanda mengenai kapabilitas pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan bencana banjir menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan kapabilitas pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta alokasi anggaran yang lebih memadai (Yusni Rahmayanti & Geovani Meiwanda, 2022).

Saputra N. G., Rifai M., dan Marsingga P. dalam penelitian mereka mengenai strategi penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, menemukan bahwa meskipun strategi penanggulangan bencana sudah ada, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir (Saputra et al., 2020).

Penelitian Anggara B., Idris A., dan Hasanah N. mengenai penanggulangan bencana banjir oleh BPBD di Kabupaten Berau menunjukkan bahwa meskipun BPBD telah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana, masih terdapat kendala yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang memadai menjadi hambatan utama dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Berau. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran dan penyediaan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung upaya penanggulangan bencana banjir oleh BPBD (Anggara et al., 2019).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian mengenai penanggulangan banjir telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan strategi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam penanggulangan banjir, yang belum banyak dibahas secara komprehensif. Penelitian ini menyoroti peran Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kolaborasi tersebut, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya sinergi antara kedua pihak. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai dinamika kerja sama multi-pihak dalam penanggulangan bencana, yang menjadi

penting dalam konteks semakin kompleksnya tantangan perubahan iklim dan peningkatan risiko banjir.

Selain itu, penelitian ini juga membawa kebaruan dalam pendekatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Banyak studi sebelumnya yang fokus pada implementasi teknis atau infrastruktur dalam penanggulangan banjir, sementara penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat sebagai bagian integral dari strategi mitigasi banjir. Dengan meninjau efektivitas program sosialisasi dan edukasi di Kabupaten Cirebon, penelitian ini menunjukkan bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat dapat secara signifikan mengurangi risiko dan dampak bencana banjir. Hal ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan solusi teknis tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kebaruan ilmiah lainnya terletak pada evaluasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan banjir di berbagai wilayah, seperti yang diidentifikasi di Kelurahan Mattoangin Kota Makassar dan Kelurahan Rancabolang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat diperoleh melalui program-program yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan melalui pendekatan yang berbasis komunitas. Dengan membandingkan berbagai model partisipasi masyarakat, penelitian ini menawarkan pandangan komparatif yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih inklusif dan efektif. Temuan-temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur penanggulangan bencana dengan menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam upaya mitigasi risiko banjir.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan secara mendalam Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan dan bagaimana kolaborasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif tersebut. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, seperti sumber daya, pengetahuan, insentif, serta potensi konflik yang mungkin muncul. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kolaborasi dalam penanggulangan bencana dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dan memperkuat faktor-faktor pendukung dalam tata kelola kolaboratif. Penelitian ini akan menyajikan rekomendasi yang berdasarkan pada temuan lapangan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang praktis bagi peningkatan sistem penanggulangan bencana di Kota

Palembang. Rekomendasi ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam proses kolaborasi.

## II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016:3), pendekatan penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Metode kualitatif dipilih karena cocok untuk menjawab unsur pokok yang sesuai dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan memahami masalah yang diteliti secara mendalam dan holistik, serta menghasilkan data yang deskriptif dan tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata dan narasi yang kaya (Murdiyanto, 2020).

Menurut Fernandes Simangunsong (2017:231), data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi partisipatif, serta dokumentasi dari sumber-sumber tertulis. Simangunsong (2017:190) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki berbagai bentuk desain penelitian yang bersifat alami dan emergent, di mana fenomena-fenomena muncul secara tiba-tiba sesuai dengan kaidah-kaidah alamiah. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam desain penelitian, sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan (Rijali, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian, seperti pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. Teknik snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan dari masyarakat yang dapat memberikan informasi tambahan yang relevan. Informan dipilih berdasarkan kualifikasi dan keterampilan mereka dalam memberikan data yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi rinci dari para informan yang telah ditentukan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan dan kondisi di lapangan, yang akan memberikan data kontekstual yang mendukung hasil wawancara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer dengan bukti-bukti tertulis, seperti surat, arsip, foto, dan catatan kegiatan yang relevan dengan penelitian (Hasibuan et al., 2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang diuraikan oleh Simangunsong (2017:226), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih poin-poin penting, dan menghapus konten yang tidak relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi terstruktur dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik. Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disusun untuk menarik kesimpulan yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis



data dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan sampai data mencapai kejenuhan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat dan komprehensif (Sari sasi gendro, 2022).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian ini dihasilkan berdasarkan data dan informasi valid yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian di Dinas PUPR Kota Palembang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. Teknik analisis data yang digunakan mencakup pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak berwenang, dan dokumentasi dari pihak terkait. Data yang diperoleh kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan berdasarkan fakta dan diolah menjadi hasil penelitian dengan berpedoman pada teori yang digunakan oleh peneliti, yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Penelitian ini fokus pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang, berdasarkan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Teori ini mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Setiap dimensi ini kemudian dikaitkan dengan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang, pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak banjir. Upaya ini mencakup kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik, seperti sosialisasi mengenai bencana dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang aktif dalam kegiatan gotong royong dan pembersihan kolam retensi, sementara Dinas Pekerjaan Umum memfasilitasi pembangunan aset pengendalian banjir.

Dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Palembang, terdapat tujuh prioritas program pengurangan risiko bencana, termasuk perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, dan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Kota Palembang memiliki indeks ketahanan daerah 0,48, yang menunjukkan kapasitas sedang dalam menghadapi bencana. Wilayah yang rentan terhadap banjir umumnya memiliki topografi datar dan berada di sekitar sungai.

Berdasarkan tabel potensi bahaya banjir di Kota Palembang, beberapa kecamatan memiliki tingkat bahaya tinggi, seperti Ilir Barat I, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Ilir Barat II. Total luas bahaya banjir di Kota Palembang mencapai 30.377 hektar dan berada pada kelas tinggi. Kerentanan dan risiko bencana banjir di kota ini termasuk kelas tinggi, dengan banyak penduduk terpapar dampak bencana banjir.

Dimensi kondisi awal dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir menunjukkan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antara pelaku kolaborasi, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pemadam Kebakaran. Selain itu, regulasi yang tidak jelas mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam wawancara dengan kepala Dinas PUPR, Ir. H. Akhmad

Bastari, dan Plt Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Birma Febriansyah, terungkap bahwa dinas terkait telah menyiapkan personel dan fasilitas untuk mengatasi banjir.

Desain kelembagaan dalam kolaborasi ini melibatkan partisipasi berbagai perangkat daerah dan instansi seperti TNI, POLRI, dan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam wawancara dengan Ir. R.A. Marlina Sylvia, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi, dan Limbah, dijelaskan bahwa dinas PUPR melakukan rekonstruksi bangunan dan menyiagakan pekerja untuk penanganan banjir. Respon masyarakat terhadap program ini juga positif, dengan sebagian besar masyarakat koperatif dalam pelaksanaan program pemeliharaan drainase.

Proses kolaborasi juga mencakup dialog tatap muka antar instansi dan membangun kepercayaan masyarakat. Pejabat pemerintah kota secara aktif meninjau lokasi banjir dan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Selain itu, pemerintah kota Palembang melalui dinas PUPR mengerahkan personel dan alat berat untuk membersihkan lingkungan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menanggulangi banjir.

Faktor pendukung program ini mencakup kebijakan pemerintah yang sistematis dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Namun, masih terdapat faktor penghambat, seperti belum maksimalnya fasilitas penanggulangan banjir dan regulasi yang kurang jelas. Upaya langsung dan tidak langsung dilakukan untuk mengatasi hambatan ini, termasuk melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas dan penempatan tugas yang tepat bagi petugas lapangan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana banjir di Kota Palembang.

### **3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini tentang tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas manajemen bencana. Dibandingkan dengan sepuluh penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan wawasan baru melalui pengaplikasian teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Temuan ini menekankan bahwa meskipun ada ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antara pelaku kolaborasi seperti Dinas PUPR dan Dinas Pemadam Kebakaran, regulasi yang tidak jelas sering menghambat kolaborasi yang efektif.

Dalam perbandingan dengan penelitian oleh Ali A., M. Musa R., dan Mallombasi A. yang fokus pada penggunaan kolam retensi sebagai metode pengendalian banjir di Sungai Lamasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa di Palembang, penggunaan teknologi modern seperti GIS dan media sosial lebih diutamakan untuk koordinasi dan penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan teknis dan kolaboratif antara daerah yang berbeda. Studi tentang manajemen risiko oleh

Simamora S., Mangunsong S., dan Dalilah A. menunjukkan bahwa kesiapsiagaan di tingkat Puskesmas di Palembang masih membutuhkan peningkatan dalam hal kebijakan dan pendanaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya kolaboratif yang baik, kelemahan dalam kebijakan dan sumber daya masih menjadi hambatan utama. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian kami bahwa regulasi yang tidak jelas dapat menghambat kolaborasi yang efektif.

Penelitian Khafian N. menekankan pentingnya koordinasi dan kepemimpinan dalam tata kelola kolaboratif untuk mitigasi darurat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif sangat penting dalam proses kolaborasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kepemimpinan yang lemah sering menghambat proses kolaborasi, yang serupa dengan temuan bahwa regulasi yang tidak jelas dapat mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab. Penelitian oleh Yulianti Y. D., Huda M., dan Suhindarno H. di Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa konsep *adaptive governance* sangat penting dalam penanggulangan banjir. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan antar lembaga formal dan informal, yang juga diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai faktor penting dalam kolaborasi yang efektif. Namun, penelitian ini lebih lanjut menekankan perlunya responsivitas yang cepat, yang mungkin tidak cukup ditekankan dalam penelitian ini.

Penelitian Afryan S. di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan sumber daya antara pelaku kolaborasi dapat menghambat efektivitas penanggulangan bencana. Kurniasari N. dan Priyatna F. N. P. dalam penelitian mereka tentang dampak banjir terhadap budidaya ikan menemukan bahwa jaringan sosial merupakan adaptasi yang efektif. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian ini yang lebih menekankan pada teknologi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase sebagai adaptasi yang efektif. Penelitian oleh Nuzsa Miyori F. dan Chofyan I. di Kelurahan Rancabolang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas bangunan pengendali banjir. Penelitian ini menekankan pentingnya fasilitas penanggulangan banjir yang memadai, yang juga diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai faktor penghambat utama dalam kolaborasi yang efektif.

Yusni Rahmayanti dan Geovani Meiwanda dalam penelitian mereka di Kabupaten Indragiri Hilir menemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran merupakan hambatan utama. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dapat menghambat proses kolaborasi. Saputra N. G., Rifai M., dan Marsingga P. di Desa Karangligar menemukan bahwa koordinasi dan dukungan yang kurang dari berbagai pihak menghambat penanggulangan bencana yang efektif. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa regulasi yang tidak jelas dan ketidakseimbangan sumber daya dapat menghambat kolaborasi yang efektif. Penelitian oleh Anggara B., Idris A., dan Hasanah N. di Kabupaten Berau menemukan bahwa kurangnya anggaran dan sarana prasarana menjadi hambatan utama. Temuan ini mendukung hasil penelitian ini yang menekankan pentingnya fasilitas dan regulasi yang jelas untuk mendukung kolaborasi yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam tata kelola kolaboratif dengan menekankan pentingnya regulasi yang jelas, penggunaan teknologi modern, dan partisipasi

aktif dari berbagai pihak. Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya namun juga menawarkan kebaruan dalam pendekatan kolaboratif yang lebih komprehensif dan integratif.

### **3.2 Diskusi Temuan Menarik**

Dalam melakukan diskusi terhadap temuan menarik dari penelitian tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, beberapa aspek penting muncul yang patut dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, temuan mengenai efektivitas kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi bencana banjir menunjukkan bahwa keterlibatan semua elemen pemerintah kota Palembang secara integral telah berjalan cukup baik. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara dinas terkait seperti dinas pekerjaan umum, dinas pemadam kebakaran, dan instansi lainnya untuk meningkatkan respons terhadap bencana.

Kedua, temuan terkait faktor pendukung program kolaborasi, seperti adanya undang-undang dan regulasi daerah yang mendukung, memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya penanggulangan bencana. Namun demikian, temuan juga menyoroti beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan fasilitas dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan peraturan formal, tetapi juga memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Terakhir, temuan menarik dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi kerentanan terhadap bencana. Penguatan dalam hal ini dapat meliputi sosialisasi, edukasi, dan peran aktif dari semua pihak terkait untuk memelihara lingkungan dan memastikan infrastruktur penanggulangan bencana berfungsi optimal. Diskusi terhadap temuan-temuan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kolaborasi efektif dalam konteks penanggulangan bencana di daerah kota Palembang.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian mendatang dapat lebih memfokuskan pada upaya-upaya konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi, serta memperkuat aspek-aspek yang telah terbukti mendukung kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan, baik di Palembang maupun daerah lainnya dengan kondisi serupa.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil. Pertama, kolaborasi antara pemerintah kota Palembang dan berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir telah menunjukkan kinerja yang baik. Proses kolaborasi ini melibatkan dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan informan, yang menunjukkan komitmen serta keselarasan dalam melaksanakan program penanggulangan bencana.

Faktor pendukung utama dalam keberhasilan program ini adalah adanya undang-undang dan peraturan daerah yang mendukung, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kota Palembang yang terkait dengan pengendalian rawa serta rencana tata ruang wilayah. Komitmen bersama antara elemen pemerintah kota Palembang juga menjadi pendorong utama dalam upaya ini.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi dalam proses penanggulangan bencana banjir di Palembang. Keterbatasan jumlah pekerja lapangan yang tersedia dalam menghadapi curah hujan tinggi serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas merupakan tantangan nyata. Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan juga perlu ditingkatkan, serta perlunya regulasi yang lebih jelas terkait dengan kolaborasi penanggulangan bencana banjir.

Upaya konkret yang telah dilakukan termasuk persiapan fasilitas sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi bencana banjir, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Selain itu, pemerintah kota Palembang juga disarankan untuk segera menetapkan peraturan yang mengatur dengan lebih jelas proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir ini, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan memperkuat efektivitas program.

### **Keterbatasan Penelitian.**

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk mengarahkan masa depan penelitian tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa arah yang dapat dijelajahi lebih lanjut. Pertama, penelitian mendesak untuk mengidentifikasi dan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antarinstansi dalam konteks penanggulangan bencana. Ini termasuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana regulasi, kebijakan, dan peran pemangku kepentingan lokal dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program.

Selanjutnya, fokus penelitian juga dapat diperluas untuk mengeksplorasi strategi inovatif dalam memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Ini termasuk pengembangan model atau framework baru yang dapat memandu implementasi kolaborasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

Selain itu, penelitian masa depan harus menyoroti integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam manajemen bencana, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan risiko banjir atau aplikasi digital untuk koordinasi respons darurat. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan pengumpulan data real-time, analisis situasional, dan komunikasi antarinstansi yang lebih efisien dalam menghadapi bencana.

Dengan mengarahkan penelitian ke arah ini, diharapkan bahwa hasil-hasil penelitian yang dihasilkan tidak hanya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoritis tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam konteks penanggulangan bencana banjir, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan respons pemerintah daerah serta masyarakat terhadap ancaman bencana di masa depan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afryan S. (2019). Implementasi kebijakan dari peraturan Bupati Bandung No 53 Tahun 2010 tentang perincian tugas, fungsi dan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- Ali, A. M., Musa, R., & Mallombasi, A. (2021). Kajian Penanggulangan Banjir dengan Menggunakan Kolam Retensi (Studi Kasus Sungai Lamasi Kabupaten Luwu). *Jurnal Teknik Sipil MACCA*, 6(1). <https://doi.org/10.33096/jtسم.v6i1.275>
- Anggara, B., Idris, A., & Hasanah, N. (2019). Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2).
- Angrelia, C., Prihata, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. (2020). PERANAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BANJIR TAHUN 2020. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.3060>
- Baskoro, A. G., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1745>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Khafian, N. (2023). The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/jgar.v4i2.53367>
- Kurniasari, N., & Priyatna, F. N. P. (2014). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN ADAPTASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK BANJIR TERHADAP USAHA BUDIDAYA IKAN DI TAMBAK. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2). <https://doi.org/10.15578/jksekp.v4i2.604>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nuzsa Miyori, F., & Chofyan, I. (2023). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rancabolang. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i1.5772>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Saputra, N. G., Rifai, M., & Marsingga, P. (2020). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar sebagai Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 8(1).
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Simamora, S., Mangunsong, S., & Dalilah, A. (2023). MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGANTISIPASI KEJADIAN BENCANA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA PALEMBANG. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 18(1). <https://doi.org/10.36086/jpp.v18i1.1664>
- Yulianti, Y. D., Huda, M., & Suhindarno, H. (2023). Adaptive Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5870>
- Yusni Rahmayanti, & Geovani Meiwanda. (2022). Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3). <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.22>

